

ABSTRAK

Studi ini menyelidiki pengaruh mekanisme pengawasan tata kelola terhadap pengungkapan risiko operasional PRO di bank-bank Islam Indonesia. PRO telah menjadi isu kritis dalam industri perbankan Islam karena kompleksitas risiko yang terlibat, yang meluas melampaui risiko operasional konvensional hingga mencakup risiko yang terkait dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah. Dalam konteks ini, tata kelola perusahaan yang efektif diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan memperbaiki kualitas pengungkapan risiko.

Studi ini mengadopsi pendekatan kuantitatif menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan tahunan bank umum syariah di Indonesia yang mencakup periode 2014 hingga 2024. Variabel independen mencakup atribut struktural, proses, dan sumber daya terkait dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), komite audit, komite pengawasan risiko, dan auditor eksternal. Hipotesis diuji menggunakan regresi data panel untuk menilai pengaruh setiap mekanisme tata kelola terhadap PRO.

Temuan menunjukkan bahwa tidak semua mekanisme pengawasan tata kelola secara signifikan memengaruhi PRO. Frekuensi rapat DPS, lintas keanggotaan DPS, dan *auditor tenure* memiliki pengaruh positif, sedangkan ukuran DPS dan spesialisasi industri auditor memiliki pengaruh negatif yang signifikan. Sebaliknya, ukuran dan frekuensi pertemuan baik komite audit maupun komite pemantauan risiko tidak memiliki pengaruh yang signifikan, demikian pula kualifikasi akademis DPS dan ukuran auditor eksternal.

Hasil ini menunjukkan bahwa PRO lebih dibentuk oleh efektivitas proses tata kelola, khususnya aktivitas pemantauan dan keahlian tata kelola, daripada hanya oleh atribut struktural formal saja. Studi ini berkontribusi pada literatur tata kelola perusahaan dan pengungkapan risiko dengan menunjukkan bahwa pengungkapan risiko operasional dibentuk tidak hanya oleh struktur tata kelola formal tetapi juga oleh proses tata kelola dan atribut terkait sumber daya, sehingga memberikan penjelasan yang lebih komprehensif tentang transparansi risiko. Temuan ini juga memberikan implikasi praktis bagi regulator dan industri perbankan Islam dengan menyoroti pentingnya kebijakan tata kelola yang menekankan kualitas proses tata kelola dan efektivitas pengawasan.

FEB UNDIP